



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);**
6. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);**
9. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);**
10. **Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);**
11. **Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 71);**
12. **Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 73);**

13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

dan

**BUPATI BELITUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 886.766.991.999,43
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp 865.889.382.198,07</u>
Surplus	Rp 20.877.609.801,36
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp 80.670.920.747,07
2. Pengeluaran	<u>Rp 671.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 79.999.920.747,07

### Pasal 3

Uraian laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 10.707.683.125,46 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 876.059.308.873,97        |
| 2. Realisasi                             | <u>Rp 886.766.991.999,43</u> |
| Selisih                                  | Rp (10.707.683.125,46)       |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp 90.040.730.633,97 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 955.930.112.832,04        |
| 2. Realisasi                          | <u>Rp 865.889.382.198,07</u> |
| Selisih                               | Rp 90.040.730.633,97         |
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 58.993.194.156,71 dengan rincian sebagai berikut:
- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. defisit setelah perubahan | Rp (79.870.803.958,07)      |
| 2. realisasi                 | <u>Rp 20.877.609.801,36</u> |
| Selisih                      | Rp 58.993.194.156,71        |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 18.992.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 80.651.928.247,07        |
| 2. realisasi  | <u>Rp 80.670.920.747,07</u> |
| Selisih   | Rp (18.992.500,00)          |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 110.124.289,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 781.124.289,00        |
| 2. realisasi   | <u>Rp 671.000.000,00</u> |
| Selisih  | Rp(110.124.289,00)       |
- f. selisih anggaran dengan realiasi pembiayaan netto sejumlah Rp 129.116.789,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp 79.870.803.958,07        |
| 2. Realisasi                                   | <u>Rp 79.999.920.747,07</u> |
| Selisih  | Rp (129.116.789,00)         |

### Pasal 4

Laporan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal             | Rp 79.951.928.247,07  |
| b. Penggunaan Sal Tahun Berjalan         | Rp 79.951.928.247,07  |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran | Rp 100.877.530.548,43 |
| d. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir     | Rp 100.877.530.548,43 |

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp 1.595.511.090.876,35
b. jumlah kewajiban	Rp 6.061.387.909,80
c. jumlah ekuitas	Rp 1.589.449.702.966,55

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. jumlah Pendapatan	Rp 940.768.503.032,81
b. jumlah Beban	Rp 858.584.939.773,98
c. Surplus defisit kegiatan Operasional	Rp 82.183.563.258,83
d. Surplus Defisit kegiatan Non operasional	Rp 190.280.100,00
e. Surplus Defisit Pos Luar Biasa	Rp 82.373.843.358,83
f. Surplus/Defisit LO	Rp 82.373.843.358,83

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2019	Rp 53.349.535.912,19
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp 138.929.178.482,57
c. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp(141.952.230.101,00)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp 47.992.500,00
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp 0,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2019	Rp 101.179.136.408,57

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i, per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp 1.462.719.949.935,90
b. Surplus/Defisit LO	Rp 82.373.843.358,83
c. Koreksi Nilai Persediaan	Rp 0,00
d. Selisih Revaluasi Aset	Rp 46.573.479.000,00
e. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp (7.114.154.810,18)
f. Dampak Akumulatif atas perubahan nilai akumulasi penyusutan aset tetap	Rp 4.896.585.482,00
g. Dampak Akumulatif atas perubahan nilai amortisasi aset lainnya	Rp 0,00
h. Dampak Akumulatif atas perubahan nilai aset lainnya	Rp 0,00
i. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp 1.589.449.702.966,55

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
  - Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah
  - Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
  - Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
  - Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya
  - Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
  - Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah
  - Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah
- i. Lampiran IX : Intisari Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

## Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 5 Agustus 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 5 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (5.7/2020).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.

NIP. 19750331 200604 1 005

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 6 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**I. UMUM**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 83**